

BAB IV

FUNGSI LPPOM MUI PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI MASYARAKAT MUSLIM

A. Gambaran Umum MUI Provinsi Lampung

1. Profil MUI Provinsi Lampung

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Cikal bakal berdirinya MUI Provinsi Lampung dimulai dari pertemuan para tokoh agama dan masyarakat Lampung pada tahun 1971. Mereka memiliki gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama dan kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung untuk memikirkan nasib Umat Islam di Lampung yang masih sangat memprihatinkan. Pada waktu itu banyak kepentingan Umat Islam yang dirugikan dan juga adanya berbagai suara sumbang yang mendiskreditkan Umat Islam. Umat Islam berjuang dengan caranya sendiri-sendiri sehingga memunculkan banyak perbedaan dan membuat posisi mereka lemah di hadapan pemerintah dan musuh-musuh Islam. Untuk mengatasi hal tersebut maka diadakan pertemuan rutin setiap bulan. Masalah yang dibahas merupakan masalah

yang urgen seperti aqidah, ukhuwah, sedangkan masalah khilafiyah tidak diperdebatkan selama masih berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.¹

Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Alim Ulama Pusat Jakarta pada Bulan September 1974 memberikan mandat untuk membentuk Majelis Ulama Lampung.² Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1974, bertepatan dengan hari Jum'at, 12 Dzulhijah 1394 H kepengurusan MUI Provinsi Lampung terbentuk dengan masa khidmat 1974 s.d 1979.³

Pada masa awal terbentuknya MUI Provinsi Lampung hanya terdiri dari MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung, MUI Kabupaten Lampung Tengah, MUI Kabupaten Lampung Selatan dan MUI Kabupaten Lampung Utara.⁴ MUI Provinsi Lampung terus berkembang mengikuti pemekaran daerah di Provinsi Lampung dan hingga saat ini sudah terbentuk MUI di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

MUI Provinsi Lampung dalam perkembangan sejarahnya telah memberikan peran untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan seperti makanan, penentuan kebenaran sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam Agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut Agama Islam dengan lingkungannya.

¹MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung: Berkarya Untuk Umat*, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014), h. 4

²*Ibid.*, h. 5

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, h. 7

Visi dari MUI Provinsi Lampung yakni terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (*baldataun thayibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah NKRI.⁵

Sedangkan misi dari Majelis Ulama Indonesia adalah:

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hassanah*)
- b. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakuk karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.⁶

MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan

⁵*Ibid.*, h.8

⁶*Ibid.*, h.8-9

kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷

Selanjutnya tugas MUI dirumuskan dalam tujuh tugas MUI, yakni:

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
- b. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- c. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
- d. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- e. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- f. Sebagai pengawal konten dalam media massa
- g. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan⁸

MUI memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khairu ummah*), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah serta jasmaniah yang diridloi Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun*

⁷<http://www.muilampung.or.id>, Profil MUI Lampung

⁸*Ibid.*

ghofur). Untuk mencapai tujuannya MUI melaksanakan berbagai usaha antara lain:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada Umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*.
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar makruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
- c. Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan.
- d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).
- f. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
- g. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.⁹

⁹Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, h.3

Selanjutnya susunan pengurus MUI Provinsi Lampung Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:¹⁰

Dewan Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag
 Sekretaris : Prof. Dr. H. A. Karomani, M. Si
 Sekretaris (Exs-Officio) : Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM

Anggota : KH. Arief Mahya
 KH. Nurvaif S. Chaniago
 Drs. H. Suhaili, M. Ag
 Drs. H. Mawardi AS
 Prof. Dr. H.M. Damrah Khair, M.A
 Drs. KH. Muhammad Ichwan Asron, M.A
 Drs. H. Bas Yuni Kahuripan, M. Ag
 Prof. Dr. Ir. H. Hasriadi Mat Akin, M.P
 Ki. R.M. Sholeh Baijuri
 Prof. Dr. H. Marzuki Noor, MS
 Dr. Agus Pahrudin, M.Pd
 Dr. H. Muhammad Khadafi, S.H., M.H
 Dr. H. Akhrul Latief, Sm.IK., S.H., M.H
 Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
 Prof. Dr. H. MA. Achlami, M.A
 Drs. H. Fauzi Fattah, MM
 Drs. Aryanto Munawar
 Ir. H. Mahfudz Santoso, MM
 Drs. H.M. Baijuri Rasyid, M. Ag
 KH. Wan Zakaria Jauhari
 H. Kherlani, SE., MM
 Fajrun Najah Ahmad
 Drs. H. Mansyuri Ismail
 Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
 Dr. Alamsyah, M. Ag
 Drs. H. Santoso Yusuf, MM.
 dr. H.M. Aditya, M. Biomed.
 Dr. H. Nurdiono, SE, MM, Akt. CPA, CSRS.

¹⁰Struktur Organisasi MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Dewan Pimpinan Harian

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Ketua Umum | : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. |
| Wakil Ketua Umum | : Drs. H. Dimyati Amin |
| Ketua I | : H. Mahmuddin Bunyamin, Lc., M.A |
| Ketua II | : KH. Bukhori Muslim, Lc., M.A |
| Ketua III | : Dr. Bunyana Sholihin, M.A |
| Ketua IV | : Dr. Abdul Syukur, M.Ag |
| Ketua V | : Suryani, S.Sos., MM |
| Ketua VI | : Drs. H. Agus Saiful Islam |
| Ketua VII | : H. Imam Asyrofi AC, S.Pd.I., M.Pd.I |
| Ketua VIII | : Dr. Sovia Mas Ayu, M.A |
| Sekretaris Umum | : Drs. KH. Basyaruddin Maisir AM |
| Sekretaris I | : Safari Daud, S.Ag., M.Ag |
| Sekretaris II | : Muhammad Faizin, S.Pd |
| Sekretaris III | : Drs. Mansyur Hidayat, M.Ag |
| Sekretaris IV | : Drs. H. Heri Sensustadi |
| Bendahara Umum | : H. Muhammad Supriyadi, S.Pd. |
| Bendahara I | : Arifin Gunawan, SE |
| Bendahara II | : H. Narsö, S.Sos., M.Si |

Susunan Kepengurusan Komisi-komisi
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung

Komisi Fatwa

| | |
|------------|--|
| Ketua | : KH. Munawir |
| Sekretaris | : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag Dr. H. Ahmad Malik Ghozali, M.A Dr. KH. Moh. Zainul Abidin, S. Ag., S.H., M.Ag |
| Anggota | : KH. Abdul Basith, S.Pd.I., M. Pd.I H. Rohmat, S. Ag., M.H.I Ikhwan Fikri, Lc., M.A Ahmad Rifa'i, M. Pd.I |

Komisi Ukhuwah Islamiyah

- Ketua : Dr. H. Damanhuri Fatah
- Sekretaris : Drs. Nur Islam
Dr. H. Yusuf Baihaki, M.A
Drs. H.A. Shodri Daram, M.E
- Anggota : Drs. KH. A. Aunullah Firdaus, M.M
H. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A
Drs. H.M. Masdar, MS, M.M.
H. Rahmat Hidayat Habibullah, S.Pd.I

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

- Ketua : Drs. KH Muhammad Rusfi
- Sekretaris : Dr. H. Rosidi
H. Suparman Abdul Karim Hasan
Suratno, S.Pd.I
- Anggota : KH. Muhammad Rais RS
Mukhit Iwanul Kirom, Lc.
Edy Muslimin, S.Sos.I
Agus Kusworo MS, S.H., M.H

Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

- Ketua : Dr. H. Arpandi Ismail
- Sekretaris : Drs. Amiruddin
Drs. H. Jamaluddin, M.M
Drs. H. Aswari Sholeh
- Anggota : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
Drs. H. Said Jamhari, M.Kom.I.
Dr. Jayusman, M.Ag.
Drs. H. Ujang Hafid

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

- Ketua : Dr. H. Fauzi
- Sekretaris : Nurdin Hasboena
Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt.
Dr. Marselina, S.E., M.Si.
- Anggota : Nelly Aida, S.E., M.Si.
Evi Ekawati, S.E., M.Si.
Rodho Intan Putri Hasibuan
Ahmad Mustafa, M.M

Komisi Informasi dan Komunikasi

| | |
|------------|--|
| Ketua | : Dr. Ahmad Isnaini, M.A |
| Sekretaris | : Maskut Candranegara Bainalhuri Halim, S.Sos., M.Kom.I Al-Huda Muhajirin |
| Anggota | : Nurachman Abdul Qodir Zaeilani, S.H.I., M.A Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I |

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Remaja

| | |
|------------|---|
| Ketua | : Dra. Hj. Tatik Rahayuningsih |
| Sekretaris | : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I Dr. Hj. Dewani Romli, M. Ag |
| Anggota | : Dra. Romlah, M.Pd.I Hj. Afifah Marno, S.Sos Dra. Hj. Komarul Kuniati, M.Kom.I Dra. Hj. Ratnasari Paksi |

Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

| | |
|------------|---|
| Ketua | : Rudy, S.H., LL.M., LL.D |
| Sekretaris | : Dr. Drs. KH. Wagianto Yudi Yusnandi, S.H., M.H Kusairi Suwandi, S.H.I., SH., M.H.I |
| Anggota | : Dr. Eva Rodian Nur, M.H Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H Marwin, S.H., M.H. Drs. H. A. Moelyono, M.H Hayatul Qodri, S.H.I. |

Komisi Pengkajian dan Penelitian

| | |
|------------|---|
| Ketua | : Drs. Henry Iwansyah |
| Sekretaris | : Dr. Sidi Ritaudin Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, M.A Dr. Sudarman, M. Ag |
| Anggota | : H. Maulana Mukhlis, M.IP Damanhuri, M.Pd Iwan Sastriawan, SH., M.H Iskandar Muda, SH., M.H |

Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Dr. Idrus Ruslan
 Sekretaris : Drs. Susiadi AS
 H. Wasril Purnawan, M. Si
 Drs. H. Lemra Horizon, M.Pd.I.
 Anggota : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
 Drs. H. Maswi
 Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
 Usman Affandi

Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

Ketua : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag.
 Sekretaris : Dadang Rukhiyat
 Rudy Irawan, S.Pd.I., M.Si.
 Dra. Hj. Fadilah Umar, M.Pd.I.
 Tajuddin Nur, S.Sos.I.
 Anggota : Ahmad Muhit Ridwan Aly
 H. Taufik Rahman, S.Ag.
 Suhandi, S.Ag., M.Kom.I.
 Khairuddin, S.Pd.I

Komisi Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Ketua : Dr. H. Ahmad Farikh
 Sekretaris : Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.
 KH. M. Radja'I
 Dr. Hj. Erina Pane, SH., M.Hum
 Ir. Hj. Agustini, M.M
 Anggota : drh. Sunanja Agung Wiwoho
 Karno Ahmad Sutarya, S.Sos.I.
 Taufik Amir, S. Sos.I
 Andi Danata, S.P. M.Sc.
 Usman Affandi

Program kerja MUI Provinsi Lampung mengacu pada orientasi perhidmatan MUI pada umumnya, yaitu meliputi :

- a. *Diniyah* (Keagamaan)
- b. *Irsyadiyah* (Memberi Arah)
- c. *Istijabiyah* (Responsif)
- d. *Hurriyah* (Independen)
- e. *Ta'awuniyah* (Tolong Menolong)
- f. *Syuriyah* (Permusyawaratan)
- g. *Tasamuh* (Toleransi dan Moderat)
- h. *Qudwah* (Kepeloporan)
- i. *Dauliyah* (Mendunia)¹¹

Selain itu program-program MUI Provinsi Lampung harus mampu menjabarkan peran utama MUI, yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasatul anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufthi*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khadimul ummah*)
- d. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)
- f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (*ishlah*)¹²

¹¹ Garis Besar Program MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021, h. 4

¹² *Ibid.*

Selanjutnya dalam Garis-garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung secara umum dapat dibedakan kedalam tiga kategori:

a. Program Umum

Program umum merupakan program untuk jangka waktu lima tahun sebagai pedoman perumusan program tahunan dalam Rapat Kerja Daerah yang akan dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung dan dapat dijadikan acuan bagi penetapan program MUI kabupaten/kota.

b. Program Prioritas (Unggulan)

Program Prioritas merupakan agenda khusus yang menjadi fokus MUI dan menjiwai setiap program MUI selama lima tahun ke depan. Setiap program yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap komisi harus diselaraskan dengan tujuan utama program prioritas tersebut. Program prioritas dikaitkan dengan program komisi dan lembaga yang dijabarkan setiap tahun dalam Rakerda.

c. Program Rintisan (*Pilot Project*)

Program Rintisan merupakan program yang ditentukan berdasarkan kepentingan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu periode, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan membentuk tim pelaksana oleh MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota secara lintas komisi dan lembaga/badan dan lintas jenjang kepengurusan.¹³

¹³ *Ibid.*, h. 4-5

Ketiga program MUI Provinsi Lampung tersebut, baik program umum, program prioritas (unggulan), maupun program rintisan (*pilot project*) harus memperhatikan tema besar Musyawarah Daerah yakni: “Islam *wasathiyah* untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban”.

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan kedalam 12 (dua belas) bidang sebagai berikut :

- a. Program Bidang Fatwa
- b. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah
- c. Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
- d. Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi
- e. Program Bidang Pengkajian dan Penelitian
- f. Program Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- g. Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat
- h. Program Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga
- i. Program Bidang Hubungan antar Umat Beragama
- j. Program Bidang Informatika dan Komunikasi
- k. Program Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam
- l. Program Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya

Alam.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, h. 5-6

Disamping itu, MUI memiliki program yang dilaksanakan oleh Badan dan Lembaga di lingkungan MUI yaitu :

- a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lampung.
- b. Dewan Syariah Daerah Majelis Ulama Indonesia (DSD MUI) Lampung (tahap rencana dan implementasi dari DSN MUI Pusat).
- c. Badan Arbitrase Syariah Daerah Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) Perwakilan Lampung.
- d. Lembaga Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqoh.
- e. Dan yang dianggap perlu, dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.¹⁵

Lingkup Program Majelis Ulama Indonesia pada 12 (dua belas) bidang dan 5 (lima) lembaga serta badan tersebut di atas kemudian diterjemahkan berdasarkan pembidangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja Tahun 2016 – 2021.

2. Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung

Keberadaan Komisi Fatwa MUI dipandang sangat penting bagi kehidupan beragama, khususnya Agama Islam. Komisi Fatwa diharapkan mencermati fenomena dan kondisi umat yang terus berkembang sehingga segala bentuk keresahan, keraguan dalam masyarakat segera dapat diatasi. Lembaga ini telah berhasil memecahkan permasalahan dan mencari solusi masalah keagamaan yang timbul di masyarakat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Tugas yang diemban oleh Komisi Fatwa tersebut

¹⁵*Ibid.*, h. 6

sangatlah berat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Tugas tersebut sangat berat dan sulit karena mengandung resiko besar dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Resiko yang besar tersebut adalah menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan mereka.

Adapun persoalan agama yang dijadikan sebagai ruang lingkup pembahasan Komisi Fatwa yakni masalah *khilafiyah* dalam hidayah *iftihadiyah*. Sedangkan persoalan yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash *qath'i*, yaitu persoalan yang tidak dalam *iftihadiyah*, maka Komisi Fatwa tidak menfatwakannya, melainkan hanya menyampaikan apa adanya sesuai yang ditetapkan oleh nash. Komisi Fatwa hanya memfatwakan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *fighiyyah* sebagai hasil *ijtihad* para ulama yang diperoleh dari *nash-nash dzanniy* sehingga terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di antara para ulama.¹⁶

Diantara sekian banyak masalah *iftihadiyah* yang dapat difatwakan oleh Komisi Fatwa yakni tentang penetapan halal dari produk-produk yang baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk-produk lainnya yang akan diperdagangkan kepada masyarakat muslim. Persoalan penetapan kehalalan suatu produk bukanlah hal yang mudah. Ia memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk menentukan bahan baku, proses pembuatan, media dan kemasannya. Ia juga memerlukan fatwa untuk menentukan kehalalan mengkonsumsinya.

¹⁶Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h.24

Semua itu tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus melalui *ijtihad* kolektif yang menghimpun para ulama, ahli teknologi pangan, ahli kimia serta para pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya.

Sesungguhnya fatwa halal terhadap suatu produk memiliki peran penting bagi konsumen dan juga produsen. Fatwa produk halal sangat penting untuk memberikan kepastian, perlindungan dan ketenangan konsumen, terutama umat Islam dari mengkonsumsi makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan yang haram, dan hal ini merupakan salah satu hak yang dilindungi undang-undang.¹⁷

Fatwa produk halal juga sangat dibutuhkan oleh para produsen untuk menarik minat konsumen Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Ia juga penting untuk meningkatkan daya saing serta untuk kebutuhan ekspor, terutama untuk tujuan negara-negara muslim.¹⁸

MUI Provinsi Lampung telah menetapkan program kerja Komisi Fatwa MUI agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan tepat. Adapun program kerja Komisi Fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman bagi umat Islam.
- b. Meningkatkan kedudukan dan peran komisi fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah diantara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis.

¹⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 8

¹⁸*Ibid.*

- c. Memasyarakatkan hasil kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi Pemerintah, lembaga swasta atau perorangan.
- d. Mengusahakan agar fatwa MUI baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang diteruskan ke MUI Pusat agar dapat menjadi hukum positif.
- e. Sosialisasi hasil fatwa MUI melalui media cetak dan elektronik, penerbitan serta media dakwah lainnya.¹⁹

Proses, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara Komisi Fatwa dengan LPPOM MUI. Untuk lebih jelasnya prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM MUI tentang benda-benda haram menurut menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatihi* dan haram *li-gairihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut. Di samping itu para auditor pun diingatkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu merupakan tugas dan tanggung jawab agama yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

¹⁹Garis Besar h.6

b. Para auditor melakukan penelitian dan auditor ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksa yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan, produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.
- Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.

c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alkohol untuk mendapat kepastian.

d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LPPOM MUI) menyarankan, bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kahalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

e. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah “Laporan Hasil Auditing” dan kemudian

“Laporan Hasil Auditing” itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat.

- f. Dalam rapat Komisi Fatwa, Direktur LPPOM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi “Laporan Hasil Auditing” dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat komisi.
- g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada LPPOM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- h. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Rapat Komisi diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi.
- i. Hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Fatwa Produk yang ditangani oleh ketua dan sekretaris Komisi Fatwa. Selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI.²⁰

3. LP-POM MUI Provinsi Lampung

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika, apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi

²⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.34-36

pengajaran Agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu LPPOM MUI juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Lembaga ini didirikan dengan alasan bahwa ajaran Islam telah mengatur masalah makanan dan minuman dengan sedemikian rupa. Makanan dan minuman dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni halal, haram atau *syubhad*. Bahan-bahan yang diharamkan dalam pelajaran agama Islam adalah bangkai, darah, babi dan hewan-hewan yang disembelih dengan nama selain Allah sedangkan minuman yang dikategorikan haram adalah semua bentuk *khamar* (minuman yang mengandung alkohol).

Secara lebih rinci tugas-tugas pokok yang diamanahkan kepada LPPOM MUI yakni:

- a. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan mengkonsep peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan, pengolahan pangan dan berbagai jenis bahan lainnya agar semuanya dapat dijamin kehalalannya.

- c. Menerbitkan sertifikat halal agar masyarakat merasa tentram dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.²¹

Adapun susunan pengurus LPPOM MUI Provinsi Lampung Masa Khidmat 2016-2021 yakni:

Dewan Penasehat:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
 Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 Ketua MUI Lampung yang membidangi Komisi Fatwa
 Ketua MUI Lampung yang membidangi Komisi Pemberdayaan Ekonomi

Dewan Pembina:

| | |
|-------------|---|
| Ketua | : Dr. KH., Khairuddin Tahmid, MH |
| Wakil Ketua | : Direktur LPPOM MUI Pusat |
| Anggota | : Dr. Ir. Sutikno, M.Sc. Suryani, S.Sos., MM |

Dewan Pelaksana:

| | |
|--|---|
| Direktur | : Dr. Ir. Yaktiwo Indriani, M.Sc. |
| Wakil Direktur | : Drh. Sugeng Dwi Hastono |
| Wakil Direktur | : Samsul Rizal, SP, M.Si. |
| Bendahara | : H. Muhamad Ainul Wafa |
| Bidang Kesekretariatan | : Maskut Candranegara, S.Pd.I |
| Bidang Auditing dan SJH | : Dwi Retno Mulyaningrum, M.Eng., M.Sc. |
| Bidang Pengkajian dan Penelitian | : Ir. Susilawati, MS |
| Bidang Sosialisasi dan Informasi Halal | : Drh. Sunandjak Agung Wiwaha |

²¹Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h.28

Bidang Pelatihan : Refliyanto, M.Pd.I
 Bidang Organisasi dan : Mashuri, SP
 Kelembagaan
 Bidang Standart dan : Ir. Otik Nawansih, MP
 Sistem Informasi Manajemen

Tenaga Ahli:

Ketua : Ir. H. Agustini, MM
 Sekretaris : Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., MM
 Anggota : Dr. H.M. Aditya, M.Biomed
 Dr. H. Iwan Dulmansyah, SKM., MS
 Sri Afrida, S.Farm., Apt.
 Dr. Ir., Susi Astuti, M.Si.

B. Prosedur Pembuatan Sertifikat Halal

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI. Berikut ini adalah prosedur yang ditentukan oleh LPPOM MUI dalam proses pembuatan sertifikat halal:²²

1. Bagi Industri Pengolahan:

- a. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama.
- b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
- c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

²²Materi Sosialisasi Halal LPPOM MUI, *Prosedur Sertifikasi Halal*

2. Bagi Restoran dan Katering:

- a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
- b. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

3. Bagi Rumah Potong Hewan:

Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama. Setelah penggolongan berdasarkan kategori usaha, beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon:²³

- a. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan
- b. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
- c. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit.

Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Pemeriksaan (audit) meliputi:

- Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).

²³Astuti Romlah, staf Sekretariat LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara tgl.26 Februari 2017

- Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
 - Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
 - Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
 - Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
- d. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- e. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
- f. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.

- g. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- h. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
- i. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

Setelah perusahaan memperoleh sertifikat halal maka memiliki kewenangan untuk mencantumkan label halal pada produknya sebagai tanda kehalalan dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya LPPOM MUI melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut agar jaminan halal produknya tetap terjaga. Pengawasan dilakukan melalui Sistem Pengawasan Sertifikat Halal dengan cara sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal
- b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
- c. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.²⁴

Selain sistem pengawasan tersebut yang harus dilakukan oleh perusahaan selanjutnya adalah melakukan perpanjangan sertifikat halal apabila telah habis masa berlakunya.

²⁴Refliyanto, Kabid Pelatihan LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara tgl. 26 Februari 2017

Adapun prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:

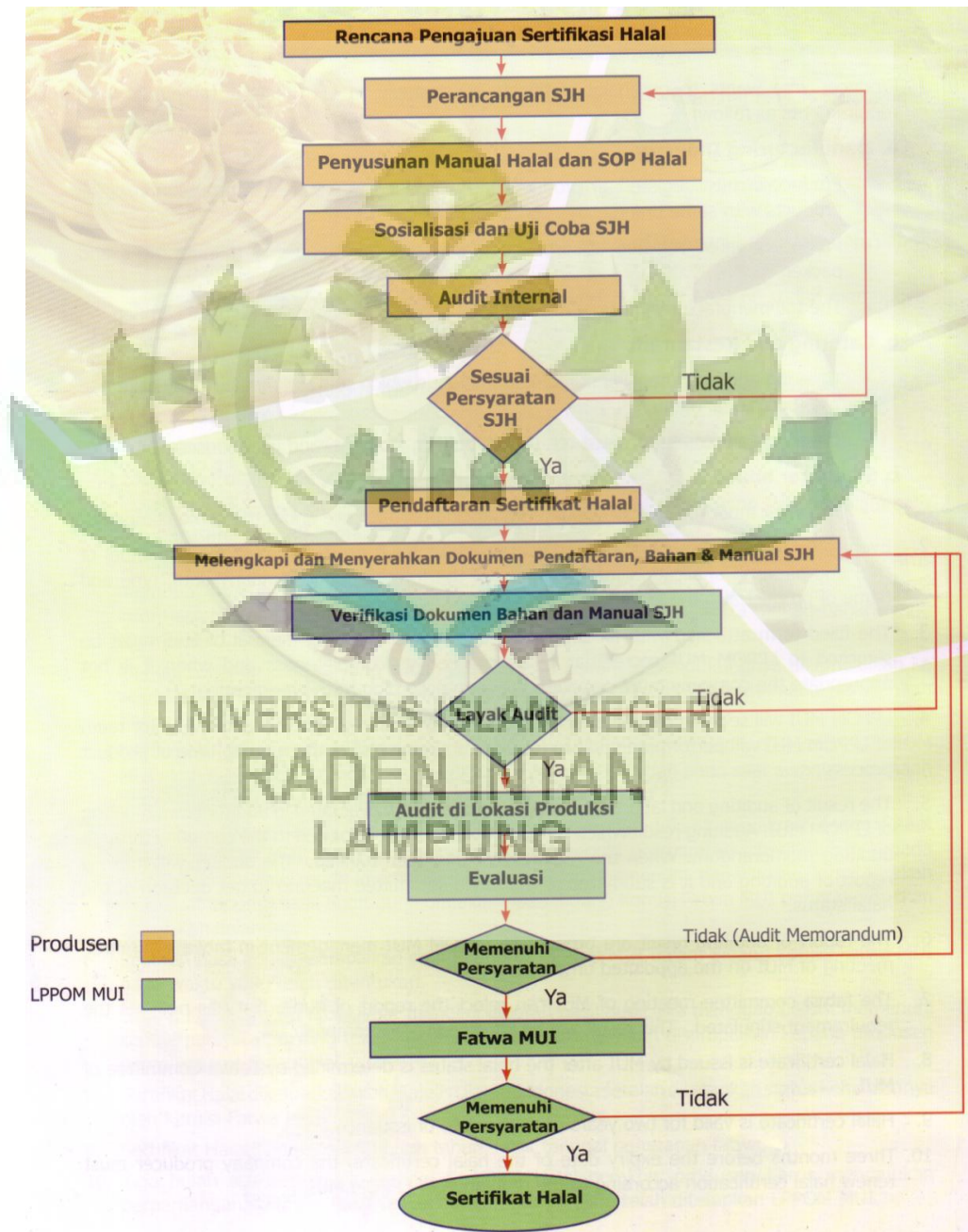
- a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
- b. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
- d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
- e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
- c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.

- d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.²⁵

Alur memperoleh sertifikasi halal dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:²⁶



²⁶Hasil Observasi Tgl. 26 Februari 2017

C. Pemberdayaan Sertifikasi Produk Halal

Pemberdayaan masyarakat berjalan seiring dengan perkembangan dan kemajuan kebudayaan umat manusia. Perkembangan dan kemajuan kebudayaan tersebut hanya bisa diperoleh dari manusia yang telah memiliki keberdayaan di berbagai sektor kehidupan. Pemberdayaan sertifikasi produk halal merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat muslim di Provinsi Lampung. Diharapkan dengan jelasnya produk yang dikonsumsi maka masyarakat muslim memperoleh perlindungan dan terhindar dari produk-produk yang haram. Dengan mengonsumsi produk halal maka umat Islam akan menjadi umat yang sehat, kuat, tangguh, serta taat pada ajaran Islam. Pada akhirnya akan terjadi peningkatan kualitas akhlak dan akidah. Umat Islam seperti inilah yang akan membawa kemajuan dan menjadikan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. Selain itu akan memberikan efek juga bagi stabilitas kehidupan bermasyarakat khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Telah banyak hal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Provinsi Lampung dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian kehalalan dari produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, diantaranya adalah:

1. Investigasi kasus penjualan daging sapi yang tercampur dengan daging babi dan beredar luas dimasyarakat serta menimbulkan keresahan umat muslim.²⁷
2. Mengadakan monitoring produk Ajinomoto di Bandung dikarenakan telah beredar isu bahwa penyedap rasa “Ajinomoto” yang mengandung unsur pengembangbiak bahannya dari babi.²⁸

²⁷MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik*, h.22

3. Mengingatkan dan melarang produsen dan toko sepatu serta sejenisnya untuk tidak mencantumkan atau menggunakan penggalan ayat dalam Al-Qur'an sebagai media bisnis dan promosi.²⁹
4. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah produk halal yang diantaranya adalah:
 - a. Fatwa tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik.
 - b. Fatwa tentang kopi luwak
 - c. Fatwa tentang transfer embrio hasil inseminasi buatan³⁰

LPPOM MUI sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat muslim dari produk yang diharamkan Islam dalam perjalanan usianya yang telah lebih dari 40 tentu telah pengalaman yang banyak. LPPOM MUI terus melakukan pembenahan dan meningkatkan peran agar masyarakat bisa mengetahui produk yang telah bersertifikat halal, mengetahui proses sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI dan timbulnya kesadaran dari semua pihak akan pentingnya masalah sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Provinsi Lampung.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh MUI Provinsi Lampung dalam upaya pemberdayaan sertifikasi halal yakni dengan melakukan sosialisasi tentang produk halal, memberikan bantuan pembuatan sertifikat halal, pembinaan Auditor Halal Internal(AHI), mengutus tenaga auditor pada pelatihan auditor halal di tingkat pusat dan upaya lain yang dilakukan dengan

²⁸ *Ibid.*, h. 34

²⁹ *Ibid.*, h. 61-62

³⁰ *Ibid.*, h. 136-138

cara bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait lainnya.³¹ Sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal maka MUI Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan dan perbaikan agar dapat memberikan pelayanan sertifikasi halal dengan baik bagi masyarakat. Adapun langkah konkrit MUI Provinsi Lampung dalam upaya pemberdayaan sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kemampuan auditor yang dimiliki oleh LP POM MUI Provinsi Lampung

Auditor LPPOM MUI adalah orang yang diangkat oleh LPPOM MUI setelah melalui proses seleksi kompetensi, kualitas dan integritasnya dan ditugaskan untuk melaksanakan audit halal. Auditor LPPOM MUI berperan sebagai wakil ulama dan saksi untuk melihat dan menemukan fakta kegiatan produksi halal di perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas auditor maka MUI Provinsi Lampung telah mengikutsertakan auditor dalam beberapa pelatihan yang menunjang seperti Pelatihan Auditor Produk Halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI Pusat, Workshop Penerapan Kesehatan Hewan dalam Pemotongannya, Sosialisasi Stunning pada Pemotongan Hewan.

LPPOM MUI Provinsi Lampung sendiri pernah mengadakan Pelatihan Calon Auditor Halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI Provinsi Lampung. Dengan mengikuti berbagai pelatihan tersebut diharapkan Provinsi Lampung akan memiliki tenaga auditor sistem jaminan halal yang

³¹Refliyanto, Kabid Pelatihan LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara Tgl 26 Februari 2017

memiliki kompetensi, ketrampilan dan sikap serta komitmen terhadap kehalalan produk yang diproduksi di wilayah Provinsi Lampung. Pelatihan ini diikuti oleh pengurus LPPOM MUI Lampung, perwakilan instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi dan MUI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.³²

2. Mengadakan sosialisasi di masyarakat

Sosialisasi jaminan halal sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka mengerti tentang pentingnya produk halal. Oleh karenanya hal ini menjadi fokus utama dari kepengurusan LPPOM MUI Lampung. Menurut Yaktiworo Indriani, Direktur LPPOM MUI Lampung Periode 2016-2021 fokus LPPOM MUI saat ini adalah akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan halal dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ke pengusaha dan UKM³³. Hal ini perlu segera dilakukan karena masih banyak produk dari pengusaha dan UKM yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal produk tersebut telah banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Provinsi Lampung. Untuk merealisasikan hal tersebut MUI Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yakni:

a. Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Halal di Kabupaten Pringsewu

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu tentang kehalalan suatu produk dan bagaimana

³²<http://muilampung.or.id>

³³Yaktiworo Indriani, Direktur LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara Tgl. 20 Juni 2017

prosedur pengurusan sertifikat halal. Adapun peserta sosialisasi terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pengusaha, pengurus MUI se-Kabupaten Pringsewu, dan pengurus MUI Provinsi Lampung.

- b. Sosialisasi melalui media massa baik media cetak maupun media online di Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan agar informasi tentang sistem jaminan produk halal dapat diakses oleh siapa saja dan selanjutnya timbul kesadaran dari masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk yang telah terjamin kehalalannya. Selain itu dari pihak pengusaha diharapkan akan memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum bisa berjalan rutin dan menjangkau masyarakat lebih banyak lagi karena adanya keterbatasan dana penyelenggaraan. Seperti disampaikan oleh Sunanjak Agung Wiwaha bahwa MUI Provinsi Lampung, khususnya LPPOM MUI belum banyak melakukan sosialisasi dikarenakan keterbatasan dana yang ada di MUI Provinsi Lampung. Sosialisasi yang pernah dilakukan yakni di Kabupaten Pringsewu dan selanjutnya melalui media online yang dimiliki oleh MUI Provinsi Lampung.³⁴

3. Pelatihan Auditor Halal Internal (AHI)

Auditor Halal Internal (AHI) merupakan staf atau beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh Manajemen Perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SJH.

³⁴Sunanjak Agung Wiwaha, Kabid Sosialisasi dan Informasi LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara tgl. 6 April 2017

AHI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi Proses Produksi Halal (PPH) di perusahaan
- b. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
- c. Mengkoordinasikan PPH
- d. Mendampingi Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan³⁵

Mengingat tugas yang sangat berat tersebut maka AHI harus dilatih agar memiliki berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya. Pengetahuan yang harus dimiliki meliputi proses produksi halal dari awal sampai akhir, mengetahui standart Sistem Jaminan Halal seperti bahan baku, proses produksi, fasilitas, audit internal. Pada saat ini pelatihan AHI dilakukan di LPPOM MUI Provinsi Lampung dengan pelatih dari LPPOM MUI Provinsi Lampung. Selanjutnya menurut Maskut Chandranegara untuk perkembangan ke depan, serta dalam rangka meningkatkan kualitas AHI dan juga pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal maka penilaian AHI nantinya akan dilakukan oleh MUI Pusat di Bogor.³⁶

Selanjutnya mereka harus membuat laporan setiap 6 bulan sekali. Ada beberapa form yang harus mereka isi dan dilaporkan ke MUI Provinsi Lampung. Tujuan dari adanya laporan ini adalah agar perusahaan tersebut dapat terawasi dan terjamin kehalalan produk dari perusahaan tersebut.

AHI bisa terdiri dari 1 (satu) orang bisa juga terdiri dari beberapa orang dalam 1 (satu) tim. Menurut penuturan Astuti Romlah apabila

³⁵Materi Pelatihan Auditor Halal Internal, *Kriteria Sistem Jaminan Halal*

³⁶Maskut Chandranegara, Kepala Bidang Kesekretariatan LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara Tgl. 20 Juni 2017

perusahaan adalah milik non muslim atau sebagian besar pimpinannya non muslim maka ketua AHI harus diambil dari karyawan yang beragama Islam. Maka yang menjadi ketua AHI adalah karyawan muslim tersebut.³⁷

4. Kerjasama dengan lembaga terkait

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal, MUI Provinsi Lampung telah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait seperti:

a. Talkshow “ Kiat Memproduksi dan Mengkonsumsi Makanan Halal”

Talkshow ini digelar dalam rangkaian acara FLASH (Festival Lampung Syariah) 2016 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan MUI Provinsi Lampung. Peserta talkshow berasal dari kalangan mahasiswa dan perwakilan dari berbagai instansi di Provinsi Lampung. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi mengenai cara mengurus sertifikasi halal serta pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Adapun narasumber talkshow berasal dari Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Cabang Lampung.

b. Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung bekerjasama dengan LPPOM MUI Provinsi Lampung. Peserta

³⁷ Astuti Romlah, wawancara Tgl. 26 Februari 2017

bimbingan teknis berasal dari pelaku usaha industri kecil dan menengah se-Kabupaten Lampung Tengah. Adapun materi yang disampaikan meliputi Pengantar Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal, Pentingnya Sertifikasi Halal, Pengetahuan Kritis Kehalalan Bahan Hewani dan Nabati, Pengenalan Sistem Jaminan Halal, Prosedur Sertifikat Halal dan Kriteria Sistem Jaminan Halal.

- c. Menjadi narasumber tentang Tata Cara Pemotongan Hewan Qurban pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Pringsewu. Dalam kegiatan ini disampaikan tata cara dan adab yang baik dalam menyembelih hewan qurban. Acara ini dihadiri oleh para pengurus masjid dan musholla di wilayah Kabupaten Pringsewu.

D. Kepastian Jaminan Halal Bagi Konsumen Muslim

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk 8.904.884³⁸. Dari jumlah tersebut mayoritas beragama Islam yakni sebanyak 7.451.251 orang atau 90 persen penduduk di Provinsi Lampung adalah muslim. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak tersebut maka wajar apabila masyarakat harus diberikan perlindungan akan produk-produk yang mereka konsumsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam umatnya diberikan tuntunan agar senantiasa mengkonsumsi produk-produk yang halal. Mengkonsumsi yang haram akan berakibat tidak baik bagi kesehatan dan lebih jauh lagi akan menyeret mereka

³⁸Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, *Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2015*, (Bandar Lampung: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2016), h. 12

ke neraka. Dengan demikian bukan hanya berkaitan dengan masalah dunia saja akan tetapi juga menyangkut masalah kehidupan di akhirat nanti.

Bentuk perlindungan terhadap umat muslim dilakukan dengan cara pemberian jaminan halal terhadap produk-produk yang dikonsumsi. Bentuk jaminan tersebut diwujudkan dengan pemberian sertifikat halal pada produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Menurut Suryani, sertifikat halal mengandung tanggung jawab dunia dan akhirat sehingga harus dijaga secara bersama-sama baik oleh pihak MUI maupun perusahaan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa dengan adanya sertifikat halal maka akan menambah kepercayaan konsumen.³⁹ Mengonsumsi produk halal merupakan hak warga negara selain itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengonsumsi produk yang halal. Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal di Provinsi Lampung yakni LPPOM MUI Provinsi Lampung. Adapun untuk wilayah kabupaten/kota yang berada di wilayah ini harus berkoordinasi dengan LPPOM MUI Provinsi Lampung. Apabila produk berada di kabupaten/kota maka yang melakukan audit adalah auditor dari provinsi dengan didampingi oleh auditor kabupaten/kota. Selanjutnya diproses oleh LPPOM MUI dan difatwakan oleh Komisi Fatwa.

³⁹Suryani, Ketua V MUI Provinsi Lampung, wawancara Tgl. 20 Juni 2017

Pelaksanaan jaminan halal bagi konsumen memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen maupun produsen. Seperti harapan yang disampaikan oleh Rusdi, bahwa masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang produk halal agar mereka dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar.⁴⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Sofyan Fandi, bahwa sosialisasi harus lebih banyak lagi dilakukan agar masyarakat memahami masalah produk halal. Selanjutnya diungkapkan bahwa mengkonsumsi produk halal selain sesuai dengan ajaran agama juga baik bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.⁴¹ Maya Noviana juga berpendapat sama yakni masyarakat harus diberi pengetahuan tentang produk halal dan perlu ditingkatkan lagi pengawasan produk di pasar oleh LPPOM MUI.⁴²

Kehendak masyarakat akan adanya jaminan produk halal harus disikapi dengan bijak oleh para pemangku kepentingan. Kondisi masyarakat yang seperti ini menjadi sinyal kuat untuk meningkatkan literasi halal di masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai tidak boleh hanya berhenti pada ranah administrasi sertifikasi halal saja. Pengertian literasi halal adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab produsen, konsumen dan

⁴⁰Rusdi, warga Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung, wawancara tgl. 4 April 2017

⁴¹Shofyan Fandi, Warga Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, wawancara tgl. 6 April 2017

⁴²Maya Noviana, Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, wawancara tgl. 4 April

masyarakat luas tentang produk halal serta keyakinan akan kehalalan suatu produk.⁴³

Agar hal tersebut dapat terwujud maka harus segera terbentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa BPJPH adalah lembaga yang berwenang untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk;
4. Melakukan registrasi sertifikasi halal produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
7. Melakukan registrasi auditor halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan auditor halal
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH⁴⁴

Mulai tanggal 10 Oktober 2016 Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah terbentuk dan masuk ke dalam struktur di Kementerian Agama RI. Meski begitu di Provinsi Lampung lembaga tersebut belum terbentuk. Oleh karenanya masih belum bisa melaksanakan amanat dari Undang-

⁴³Majalah Bimas Islam, Jalan Panjang Menuju Literasi Halal di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016, h. 14

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h.8

Undang-Jaminan Produk Halal. Menurut Chotibul Umam, pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunggu regulasi selanjutnya yang mengatur pembentukan BPJPH di Provinsi Lampung. Setelah ada peraturan yang mengaturnya maka BPJPH akan bisa terbentuk dan dapat melaksanakan tugas di Provinsi Lampung. Selama belum terbentuk maka kewenangan masih di MUI Provinsi Lampung.⁴⁵

Selama lembaga tersebut belum terbentuk maka MUI Provinsi Lampung khususnya Komisi Fatwa dan LPPOM MUI harus berbenah diri dan bersama-sama dengan pemerintah akan menjalankan amanat undang-undang tersebut. Menurut penuturan Yaktiworo Indriani, LPPOM MUI telah mengadakan Munas dan akan mempersiapkan langkah-langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan amanat UU Jaminan Produk Halal.⁴⁶ LPPOM MUI akan mengadakan evaluasi internal dan menunggu arahan selanjutnya dari pusat.

Dengan adanya BPJPH diharapkan meningkatkan kepastian dan kenyamanan masyarakat muslim dalam mengkonsumsi berbagai produk yang beredar di Provinsi Lampung dan tidak ada lagi produk-produk yang haram di pasaran. Seperti harapan yang disampaikan oleh Jamroji yakni melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka hendaknya pemerintah segera menindaklanjuti dalam memfasilitasi masyarakat pada tiap-tiap kabupaten/kota.⁴⁷ Oleh karenanya semua pihak harus segera berbenah diri agar UU Jaminan Produk Halal dapat terlaksana dengan baik.

⁴⁵Chotibul Umam, Kasi Produk Halal Kanwil Kemenag.Provinsi Lampung, wawancara Tgl. 21 Maret 2017

⁴⁶Yaktiworo Indriani,wawancara Tgl. 20 Juni 2017

⁴⁷Jamroji, wiraswasta, wawancara tg.l. 6 April 2017